



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DI KTT MELANESIAN SPEARHEAD GROUP

Rizki Roza

Analisis Legislatif Ahli Madya
rizki.roza@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group ke-23 (KTT MSG) telah dilaksanakan pada 18–23 Juni 2025 di Suva, Fiji. KTT ini dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota MSG dan juga wakil dari Australia dan China sebagai tamu kehormatan. Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI), Arrmanatha Christiawan Nasir. Kehadiran delegasi Indonesia pada KTT ini sekaligus menandai satu dekade keterlibatan Indonesia yang telah menjadi *Associate Member* sejak tahun 2015.

MSG dibentuk dengan tujuan untuk mendorong perdamaian dan kemakmuran di kawasan Pasifik. MSG mengupayakan kemajuan kawasan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Negara-negara MSG meliputi 86 persen populasi kawasan Pasifik, 98 persen produk domestik bruto (PDB), dan mencakup hampir separuh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kawasan Pasifik. Negara MSG memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah. Nilai strategis negara anggota MSG dan negara lainnya di Kepulauan Pasifik terhadap dinamika geopolitik terus meningkat. Di hadapan KTT MSG, Wamenlu RI menyampaikan bahwa dengan kekuatan dan nilai strategisnya itu, negara-negara MSG semestinya dapat menjadi pemimpin kawasan Pasifik.

Dihadapkan pada berbagai tantangan global dan regional, Indonesia berupaya mendorong kesatuan masyarakat Pasifik dan membangun kerja sama konkret demi memajukan perdamaian dan kemakmuran bersama. Delegasi Indonesia menyampaikan kepada KTT MSG ke-23, bahwa Indonesia siap untuk menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara MSG, khususnya dalam sektor ekonomi biru, ketahanan lingkungan, perdamaian dan keamanan, kesehatan, pembangunan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Indonesia menekankan pentingnya pembangunan dan kemajuan ekonomi, dan mendorong kerja sama yang memberikan hasil nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat negara MSG dan kawasan Pasifik.

Posisi Pemerintah Indonesia mengenai kerja sama dengan negara-negara MSG juga telah disampaikan Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri MSG di Port Vila, Vanuatu pada November 2024. Penguatan kerja sama dengan negara-negara MSG menjadi salah satu komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan diwujudkan melalui tiga prioritas utama, yaitu *pertama*, mendorong kerja sama pembangunan; *kedua*, memperkuat ketahanan kawasan; dan, *ketiga*, menjadi jembatan bagi kawasan Pasifik.

Wamenlu Arrmanatha juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin dan perwakilan sejumlah negara di sela KTT MSG ke-23. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas penguatan kerja sama bilateral dan kemitraan Indonesia dengan kawasan Pasifik. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, Wamenlu RI menyampaikan harapan Indonesia agar MSG dapat terus menjadi wahana kolaborasi negara-negara MSG untuk perdamaian dan kemakmuran bersama. Hal ini disampaikan berkenaan posisi Fiji yang baru saja menerima keketuaan MSG dari Vanuatu. Indonesia juga memandang Fiji sebagai sahabat baik dan mitra penting Indonesia di kawasan Pasifik. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Fiji. Wamenlu juga melakukan

pertemuan untuk membahas persiapan KTT Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) dengan Menlu Kepulauan Solomon, Peter Agovaka, dan Sekretaris Jenderal PIF, Baron Divavesi Waqa. Hal ini penting untuk dibahas karena Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan kawasan Pasifik. Kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat Pasifik terhadap perubahan iklim dan bencana alam menjadi salah satu agenda penting kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan.

Selain berbagai komitmen penguatan kerja sama antara negara-negara MSG, terdapat catatan penting lain yang perlu menjadi perhatian, yaitu pemberitaan yang dipublikasikan oleh *postcourier.com*. Pemberitaan itu menyebutkan bahwa Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengajak negara anggota MSG untuk membuka kembali kemungkinan pembicaraan keanggotaan penuh untuk Papua Barat di MSG. Pernyataan itu segera diklarifikasi oleh PM Marape, dengan menyebut telah terjadi misinterpretasi. PM Marape menegaskan pengakuan PNG terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua Barat, dan menyatakan bahwa MSG juga berhak untuk membicarakan masalah hak asasi manusia, kesejahteraan, dan pelestarian warisan budaya Melanesia, termasuk dengan mengadvokasi bangsa Melanesia dimana pun mereka berada dengan tetap menghormati batas-batas kedaulatan.

Atensi DPR

Peningkatan hubungan diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang dengan negara-negara kawasan Pasifik merupakan sesuatu yang relatif baru bagi Indonesia yang secara geografis merupakan bagian tak terpisahkan dari kawasan ini. Namun, kini turut menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi bagi kemajuan dan kemakmuran kawasan Pasifik, termasuk di dalamnya negara-negara anggota MSG, telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia. Berusaha hadir untuk menjadi mitra setara yang dapat diandalkan oleh negara-negara anggota MSG, menuntut komitmen sekaligus kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan bersama.

Komisi I DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu terus mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bahwa setiap kerja sama yang dikembangkan dalam kerangka MSG harus selalu berlandaskan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan demi mewujudkan stabilitas dan kemakmuran masyarakat kawasan. Komisi I juga perlu mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bahwa kerangka kerja sama MSG dikembangkan dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing negara.

Sumber

antaranews.com, 24 Juni 2025;
kemlu.go.id, 23 Juni 2025;
metrotvnews.com, 29 November 2024;
pmnec.gov.pg, 27 Juni 2025; dan
postcourier.com, 24 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*